

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN PERIODE
2008 - 2012**



Skripsi Oleh :

NIRA AYU PUTRI PERMATASARI
01101403006
Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2014

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nira Ayu Putri Permatasari
NIM : 01101403006
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2008 – 2012.**

Pembimbing:

Ketua : Drs.H.Ubaidillah,CPA,MM,Ak,CA

Anggota : Ahmad Subeki,SE,MM,Ak,CA

Tanggal Ujian : 26 Maret 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 28 Maret 2014

Pembuat Pernyataan,

Nira Ayu Putri Permatasari

NIM. 01101403006

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”

(QS Al-Ankabut [29]: 6)

“I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I’m doing it myself.”

([Albert Einstein](#))

“Bekerjalah dengan kedua tanganmu sendiri, dan berdirilah dengan kedua kakimu sendiri”

(Penulis)

“We got what we deserve”

(Penulis)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang Tuaku tercinta
- ❖ Saudaraku tersayang
- ❖ Teman-teman seperjuangan
- ❖ Dosen dan Almamaterku

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : **Nira Ayu Putri Permatasari**

Jenis Kelamin : **Perempuan**

Tempat/Tanggal Lahir : **Palembang, 13 September 1992**

Agama : **Islam**

Status : **Mahasiswi / Belum Menikah**

Alamat Rumah (Orangtua) : **Jl. Macan Lindungan, tunggal 4, No.07/3251.**

Alamat Email : **niranish@yahoo.com**

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : **SD Negeri 193 Palembang**

SLTP : **SLTP Negeri 17 Palembang**

SMU : **SMU Negeri 1 Palembang**

Pengalaman Organisasi : **Anggota Kepengurusan HIMAFEK 2010-2013**

Penghargaan Prestasi : **- Juara 2 English Debate Competition GELC (2010)**
- Juara 2 Regional English Debate Competition Bina Darma (2010)
- Juara 2 National Fusion Culture Festival Universitas Indonesia (2012)
- Juara 2 Speech IBGK's Effect (2013)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**

PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2008 – 2012”.

Penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa bimbingan, pengarahan, dukungan secara moril maupun bersifat materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Taufiq, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan waktu, pengarahan yang penuh kesabaran dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, kritik, dan bantuan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
4. Staf Administrasi Jurusan Akuntansi dan Pegawai TU Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, yang selalu memberikan bantuan dari awal perjalanan sampai akhir pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan yang luar biasa.
6. Kedua Orang Tua dan adik, yang banyak memberikan doa, bantuan, motivasi dan dukungan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi 2010 Kelas A, Kelas B, dan Kelas C.
8. Sahabat dan kekasih tercinta.

9. Keluarga ku di HIMAFEK. Kakak-kakak senior, teman-teman, dan adik-adik tercinta yang selama ini memberikan motivasi.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama ini.

Palembang, 11 Februari 2014

Penulis,

Nira Ayu Putri Permatasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN GRAMMER.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	2
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8

1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis.....	11
2.1.1 Anggaran.....	11
2.1.2 Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.2.2 Jenis Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.2.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	17
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.1.4 Dana Alokasi Umum.....	22
2.1.4.1 Definisi Dana Alokasi Umum.....	22
2.1.4.2 Dasar Hukum Dana Alokasi Umum.....	22
2.1.4.3 Alokasi Dana Alokasi Umum.....	22
2.1.5 Dana Alokasi Khusus.....	23
2.1.6 Dana Bagi Hasil.....	24
2.1.7 Belanja Modal.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel.....	30
3.2 Pengukuran Variabel.....	30
3.2.1 Variabel Independen.....	30
3.2.1.1 Variabel Pendapatan Asli Daerah.....	30
3.2.1.2 Variabel Dana Alokasi Umum.....	31
3.2.1.3 Variabel Dana Alokasi Khusus.....	31
3.2.1.4 Variabel Dana Bagi Hasil.....	31
3.2.2 Variabel Dependen.....	32

3.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	32
3.4 Kerangka Pemikiran.....	34
3.5 Hipotesis Penelitian.....	35
3.6 Metode Pengambilan Data.....	36
3.7 Metode Analisis.....	36
3.7.1 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.7.2 Uji Regresi Berganda.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Objek Penelitian.....	40
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.3 Uji Normalitas.....	42
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.4.1 Uji Multikolinieritas.....	43
4.4.2 Uji Heteroskedasitas.....	44
4.4.3 Uji AutoKorelasi.....	44
4.5 Uji Regresi Berganda.....	45
4.6 Pengujian Hipotesis.....	46
4.6.1 Uji Statistik t.....	46
4.6.2 Uji Statistik F.....	48
4.7 Koefisien Determinasi.....	48
4.8 Pembahasan.....	49

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	53
5.3 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1	Analisis Statistik Deskriptif	40
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas: One-Sample Kolmogorov.....	42
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi	44
Tabel 4.5	Hasil Uji Regresi Berganda.....	45
Tabel 4.6	Hasil Uji Statistik t.....	46
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik F.....	48
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas : Scatterplot.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	
Daftar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Beserta Data Sekunder Penelitian.....	57
Lampiran 2	
Hasil Output SPSS 20.0.....	59

ABSTRAK

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/I(ota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008 - 2012.

Oleh: Nira Ayu Putri Permatasari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten I kota di Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal. Dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi IJmum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal.

Palembang, 2 April 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.6 Latar Belakang Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Berlandaskan dengan penjelasan yang ada dalam UU tersebut diketahui bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dan penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik.

Hal ini juga berkenaan dengan peningkatan layanan publik yang nantinya akan berguna untuk menarik minat investor membuka usaha di daerah dan pemerintah daerah harus mampu menyediakan fasilitas memadai untuk kegiatan investasi yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Berangkat dari sinilah, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanjamodal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU

32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil. Sumber DBH meliputi penerimaan dari pajak dan sumber daya alam. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan SDA yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan DBH terhadap pendapatan daerah dapat meningkat. Namun pembagian dana bagi hasil ini menimbulkan konflik tersendiri. Banyak daerah penghasil yang menilai bahwa pembagian dana bagi hasil kurang memenuhi tuntutan rasa keadilan. Daerah penghasil menilai bagian Dana Bagi Hasil untuk mereka jauh lebih sedikit dibandingkan bagian yang didapat oleh pusat. Akibatnya banyak daerah yang menuntut pemerintah pusat untuk merevisi UU No 34 Tahun 2004 tersebut. Evaluasi dan transparansi penyaluran Dana Bagi Hasil ini juga perlu dilakukan agar terlihat jelas kemana saja uang Dana Bagi Hasil ini tersalur demi berlangsungnya pembangunan daerah.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja

modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat.

Fenomena yang terjadi adalah pengalokasian anggaran belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang dinilai kurang efektif. Alokasi untuk belanja pegawai jauh lebih tinggi dibandingkan untuk belanja modal. Pada tahun 2012, alokasi anggaran belanja modal Kabupaten Lahat sebesar Rp 202.067.000.000 sedangkan untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp 564.555.000.000. Jadi alokasi untuk anggaran belanja modal adalah 19,02% dari total belanja, dan alokasi anggaran belanja pegawai adalah 53,14% dari total belanja. Dan untuk kota Palembang sendiri, alokasi anggaran belanja modal tahun 2012 adalah Rp 365.728.000.000, sedangkan alokasi anggaran belanja pegawainya adalah sebesar Rp 1.098.205.000.000. Jadi alokasi anggaran belanja modal sebesar 17,75% dari total belanja, dan alokasi anggaran belanja pegawai adalah sebesar 54,64% dari total belanja.

Pengalokasian anggaran belanja modal pun masih dibilang tidak konsisten di setiap tahunnya. Di Kabupaten Lahat, alokasi anggaran belanja modal pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 173.080.000.000, tahun 2009 naik menjadi Rp 193.699.000.000, tahun 2010 turun menjadi Rp 147.255.000.000, tahun 2011 naik kembali menjadi Rp 170.889.000.000, dan tahun 2012 naik menjadi Rp 202.067.000.000.

Untuk Pendapatan Asli Daerah sendiri yang sumbernya datang dari pajak daerah dan retribusi daerah, hanya mampu memberikan kurang dari 20% untuk pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai belanja. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal yang dianggarkan. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.

Nugroho Suratno Putro pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah dan menyimpulkan bahwa, hanya dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Pungky Ardhani tahun 2011 dengan menambahkan variabel Alokasi Dana Khusus menyimpulkan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan,

Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Romario R.F. melakukan penelitian yang serupa pada tahun 2012 dengan menambahkan variabel Dana Bagi Hasil. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Uji F, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Berdasarkan perbedaan hasil uji dari beberapa penelitian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang sudah ada, namun terdapat perbedaan pada periode penelitian, objek penelitian, dan juga pada teknik pengambilan sampel penelitian. Penelitian ini tetap berusaha ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal dan mengetahui indikator mana yang lebih dominan dalam mempengaruhi variabel dependen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012.**

1.7 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.8 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun secara simultan.

1.9 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan juga pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2. Bagi Peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini dan juga bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan pengaruhnya terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen yang berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan alokasi anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.10 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai penyusunan skripsi, berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan yang pembagiannya dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian serta menjelaskan secara rinci mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, pengujian regresi dan juga pembahasan secara teoritik baik secara kuantitatif dan statistik.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Akeem, Usman O. 2011. *Revenue Allocation Formula and Its Impact On Economic Growth Process In Nigeria*. Journal of Economics and Sustainable Developmen, Vol 2, No.3. International Institute of Science, Technology, and Education, 2222-2855.
- Andaiyani. 2012. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Universitas Tanjungpura.
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.
- Herlina Rahman. 2005. Dalam Negara Hukum.com. *Pendapatan Asli Daerah*. Diambil pada tanggal 5 Desember 2013 dari www.negarahukum.com
- Kementerian Keuangan RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data Keuangan Daerah. Diambil pada tanggal 20 Agustus 2013 dari www.djpk.depkeu.go.id
- Kementerian Keuangan RI. Perpustakaan Online. "Membangun Masa Depan". Diambil pada tanggal 20 Agustus 2013 dari www.perpustakaan.depkeu.go.id

- Mahmudi. Studi Kasus sebagai Strategi Riset untuk Mengembangkan Akuntansi Sektor Publik. 2003. Diambil pada tanggal 16 Januari 2014 dari (<http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/view/850/776>)
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mujtaba, Agung. 2013. [Pengertian Anggaran Sektor Publik! Fungsi, Prinsip, dan Jenis Anggaran Sektor Publik](http://pendidikan776.blogspot.com/2013/06/pengertian-anggaran-sektor-publik-fungsi-prinsip-jenis-anggaran-sektor-publik.html). Diambil pada tanggal 16 Januari 2014 dari <http://pendidikan776.blogspot.com/2013/06/pengertian-anggaran-sektor-publik-fungsi-prinsip-jenis-anggaran-sektor-publik.html>
- Mulyadi, 2001. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Perbanas Institute. *Anggaran Daerah*. Diambil pada tanggal 20 Agustus 2013 dari www.perbanasinstitute.ac.id
- Putro, Nugroho S. 2008. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro.
- Romario R.F. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Samuels, David. 2000. *Fiscal Horizontal Accountability? Toward Theory of Budgetary "Checks And Balances" in Presidential Systems*. University of Minnesota, working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business* Buku 2. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Sumarsono, Sonny. 2010. [Manajemen Keuangan Pemerintahan](#). Penerbit Graha Ilmu. Jakarta.

Syaiful (2006). "Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan". Artikel.

Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Product Domestic Regional Bruto Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Universitas Pattimura Ambon.

Von Hagen, Jurgen. 2002. *Fiscal Rules, Fiscal Institutions, And Fiscal Performance*. The Economic and Social review 33 (3): 263-284.

Wandira, Agus Arbie. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Universitas Negeri Semarang.

Warsito. 2001. Dalam Negara Hukum.com. *Pendapatan Asli Daerah*. Diambil pada tanggal 5 Desember 2013 dari www.negarahukum.com